

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corporate Social Responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan) sering dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban finansial seperti kepada pemegang saham atau stakeholder tetapi juga kewajiban–kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang jangkauannya lebih luas yaitu: konsumen, karyawan, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan¹. Idealnya sebuah perusahaan yang beraktivitas dilingkungan masyarakat ataupun kelompok kepentingan berkaitan terjalin sebuah hubungan mutual yang mendukung segala aktivitas. Hubungan baik yang berkesinambungan ini mampu memberi dampak positif terhadap kondisi sosial, ekonomi maupun kestabilan politik dalam wilayah tersebut.

Perusahaan dituntut mampu dalam memahami situasi dan kondisi masyarakat sekitar, pasalnya setiap aktivitas produksi, distribusi, bahkan hingga kegiatan niaga masih berada dalam dinamika sosial masyarakat sekitar. Berangkat dari dinamika tersebut dibutuhkan suatu respon atau tanggap sosial terhadap kepentingan-kepentingan *stakeholder* yang berkaitan. Orientasi bisnis yang bombastis dari sebuah perusahaan memiliki potensi kecemburuan sosial jika keberadaan perusahaan tidak mendukung kesejahteraan maupun pembangunan sekitar areal kerja. Untuk menjawab tantangan tersebut beberapa perusahaan di

¹ Pratiwi Raisa. September 2012. “*Pengaruh Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Corporate Social Responsibility dengan kinerja keuangan Perusahaan*”, Jurnal Ilmiah STIE MDP, Forum Bisnis dan Kewirausahaan, Volume 2 No. 1. hlm 17.

Indonesia mulai mengenal sebuah konsep yang dapat mengatur antara tantangan dan peluang keberlangsungan usaha. Sebuah perusahaan yang berhasil dipastikan memiliki prinsip investasi bisnis dan investasi sosial secara tidak luput dari perhatian.

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu²:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

2. *Accountability* (akuntabilitas),

Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4. *Independency* (kemandirian)

Yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

² Kaihatsu S. Thomas, Maret 2006, "*Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*". Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan . Volume 8 No. 1, hlm. 2.

Yaitu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan yang berlaku. Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku

Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) agar perilaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Dengan pemahaman tersebut, maka pada dasarnya CSR memiliki fungsi atau peran strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen resiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (*social security*). Selain itu melalui CSR perusahaan juga dapat membangun reputasinya, seperti meningkatkan citra perusahaan maupun pemegang sahamnya, posisi merek perusahaan, maupun bidang perusahaan.

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa CSR berbeda dengan *charity* atau sumbangan sosial. CSR harus dijalankan atas suatu program jangka panjang. Sementara sumbangan sosial lebih bersifat sesaat dan berdampak sementara.

Semangat CSR diharapkan dapat mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan.

Pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan ini diharapkan dapat kembali menjadi budaya bagi bangsa Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia dalam kebersamaan mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Melalui CSR, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal maupun masyarakat luas akan lebih terjamin. Kondisi ini pada gilirannya akan menjamin kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi perusahaan serta pemasaran hasil-hasil produksi perusahaan. Adapun terjaga nya kelestarian lingkungan dan alam selain menjamin kelancaran produksi juga menjamin ketersediaan pasokan bahan baku produksi yang diambil dari alam.³

Untuk membangun hubungan mutual antara perusahaan dan *stakeholder* terkait dibutuhkan pelibatan komunikasi dua arah. Pada dasarnya CSR memiliki fungsi interaksi sosial menciptakan situasi dan kondisi harmonis perusahaan dan masyarakat sebagai objek dari interaksi sosial tersebut. Pengambilan keputusan sebuah perusahaan yang berdampak pada lingkungan sekitar idealnya masyarakat dan *stakeholder* terkait harus saling berkaitan. Muara dari hubungan mutual tersebut dapat menghasilkan komitmen berkelanjutan.

Definisi CSR menurut *World Business Council on Sustainable Development* adalah komitmen dari bisnis/perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. Istilah ini umumnya berlaku untuk usaha yang melampaui apa yang mungkin dibutuhkan oleh regulator atau kelompok perlindungan lingkungan. CSR juga dapat disebut

³ Alexander G. Flor dan Hafied Cangara, *Komunikasi Lingkungan*. Penanganan Kasus-kasus Lingkungan Melalui Strategi Komunikasi. (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm, 236

sebagai “kewarganegaraann korporat” yang menimbulkan biaya jangka pendek yang tidak memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan, namun justru mendorong perubahan sosial dan lingkungan yang positif.⁴

Hal ini juga senada, orientasi bisnis idealnya selaras dengan orientasi masyarakat dan lingkungan. Pelibatan diskursus-diskursus pengambilan keputusan berkelanjutan, pihak perusahaan turut menampung aspirasi masyarakat. *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau yang lebih dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu komitmen berkelanjutan dunia bisnis untuk bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.

Dunia bisnis juga dituntut menyelaraskan pencapaian kinerja laba dengan kinerja sosial dan kinerja lingkungan. Pencapaian itu akan menempatkan perusahaan menjadi warga masyarakat yang baik (*good corporate citizen*) dan meraih keuntungan langgeng. Hal ini menunjukkan perlu adanya keseimbangan antara pengambilan-pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak bisnis dengan dampak-dampak bagi masyarakat dan lingkungan melalui perilaku sosial.⁵

Di Indonesia, CSR semakin menguat setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, dimana dalam pasal 74 antara lain diatur bahwa (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

⁴ Ibid., 232

⁵ Cholillah Suci Pratiwi, dkk. *Politik & Pemerintahan di Ranah Lokal* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 154

Meskipun secara teoritis telah menjabarkan konsep CSR yang mengacu kepada *Good Corporate Governance* secara ideal, namun pada praktiknya CSR di Indonesia mengalami tantangan. Konflik sosial antara masyarakat dan perusahaan di Indonesia masih rentan terjadi, sehingga muara dari konflik tersebut menciptakan gerakan sosial. Salah satu contohnya masyarakat Kecamatan Polanharjo Klaten menuntut PT. Aqua Tirta Investama.

Ratusan warga dari kecamatan Polanharjo bergabung dengan Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Polanharjo berunjuk rasa didepan didepan Kantor PT. Tirta Investama Klaten, Desa Kwangen, Kecamatan Polanharjo. Mereka menuntut kepedulian dari perusahaan yang memproduksi air mineral kemasan Aqua itu terhadap masyarakat sekitar lokasi perusahaan tersebut. Tujuan aksi itu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kecamatan Polanharjo yang belum dapat dirasakan oleh sebagian desa di Polanharjo. Kebijakan CSR yang sampai saat ini hanya dirasakan lima desa yang seharusnya dua belas desa kecamatan Polanharjo.

Tuntutan dari masyarakat Kecamatan Polanharjo kepada PT. TI Klaten di antaranya pemerataan CSR, tenaga kerja, dampak lingkungan akibat kendaraan transportasi, dampak berkurangnya debit air, kepedulian pabrik terhadap lingkungan dan keterbukaan dari PT. Tirtatama Investama dan Pemkab Klaten mengenai retribusi yang dikembalikan untuk Kecamatan Polanharjo.⁶

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang terorganisir dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka. Tujuan ini dicapai secara seksama melalui teknik-teknik dan metode-metode dengan maksud agar memungkinkan

⁶*Op. Cit*, 243-244

individu-individu, kelompok-kelompok maupun komunitas-komunitas memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan memecahkan masalah-masalah penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerjasama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial. suatu kegiatan yang terorganisir dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka.⁷

Menurut Bappenas, dalam Rini Sulistiawati menjelaskan tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan ekonomi, memerlukan terciptanya kondisi-kondisi dasar yaitu : 1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; 2) penciptaan sektor ekonomi yang kokoh; dan 3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Kesejahteraan masyarakat diharapkan akan terwujud apabila pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak pada tingkat upah yang layak. Fakta yang ditemui adalah Indeks Pembangunan Manusia secara nasional maupun provinsi masih rendah yaitu masih pada kategori *Medium Human development*. Relatif rendahnya capaian IPM tersebut berarti telah terjadi masalah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.⁸

Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 5.009,82 km dengan populasi 320.108 jiwa pada tahun 2019 dan ibukotanya ialah kota Kuala Tungkal, yang letaknya berada di kecamatan Tungkal Ilir. Kabupaten ini terbagi menjadi 13 kecamatan dan memiliki 20 kelurahan serta 138 desa. Sebelumnya, kabupaten ini bergabung dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang kemudian dimekarkan menjadi kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kabupaten yang berbatasan dengan laut, memiliki masyarakat yang heterogen. Suku Jawa, Banjar, Palembang, Tionghoa, Kerinci, India dan berbagai etnis lainnya berbaur di kabupaten yang terkenal dengan julukan kota bersama ini terus berkembang. Kelapa kopra, Kelapa Sawit,

⁷ Anton A.P Sinaga, Juni 2016, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Kota Medan”, Jurnal Ilmiah Methonomi. Volume 2 No. 1. Hlm. 2.

⁸ Rini Sulistiawati, Oktober 2012, “Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia”. ISSN 1693-9093. Volume 8 No.3. Hlm. 195 211

Pinang dan beraneka buah-buahan adalah sumber daya alam yang banyak terdapat di daerah ini. Sektor pertambangan juga memiliki kekayaan minyak bumi dan gas yang saat ini dikelola oleh perusahaan asing juga merupakan kekayaan asli dari daerah ini. Secara kesejahteraan masyarakat, kabupaten ini memiliki persentase penduduk miskin rata-rata 10% dari keseluruhan penduduknya.

Tabel 1.1
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tahun 2012-2019.

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2012	254.547	32,10	10,92
2013	270.069	34,87	11,03
2014	279.000	35,68	11,64
2015	286.671	39,10	12,63
2016	303.479	37,24	11,81
2017	314.436	36,33	11,32
2018	348.495	36,28	11,10
2019	364.012	35,12	10,56

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan data yang diperoleh, angka kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak menunjukkan penurunan yang signifikan dalam 9 tahun terakhir. Sementara Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan tempat beroperasi beberapa perusahaan besar yang mengolah sumber daya alam kabupaten ini.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (jiwa)
tahun 2015-2019.

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kerinci	19.200	17.620	17.621	16.790	17.000
Merangin	35.800	36.890	35.484	33.945	31.660
Sarolangun	28.500	26.370	25.608	25.700	25.390
Batanghari	28.100	28.390	27.486	27.549	26.530
Muaro Jambi	18.300	17.520	18.280	17.382	16.860
Tanjung Jabung Timur	30.200	27.420	27.216	26.993	25.840
Tanjung Jabung Barat	39.100	37.240	36.332	36.283	35.090
Tebo	23.600	23.040	23.176	22.856	21.770
Bungo	19.500	20.960	20.812	21.113	20.870
Kota Jambi	55.500	51.610	52.075	50.606	49.800
Kota Sungai Penuh	3000	2.750	2.462	2.476	2.810
Jumlah/Total	300.700	289.810	286.552	281.693	274.320

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan data jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi, pada tahun 2019 Kota Jambi menempati posisi tertinggi sebanyak 49.800 jiwa, disusul oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 35.090 jiwa. Kemudian pada tahun 2018 Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencapai angka 36.283 setelah Kota Jambi pada posisi tertinggi sebanyak 49.800, tahun 2017 sebanyak 36.332 jiwa setelah Kota Jambi pada posisi tertinggi sebanyak 52.075 jiwa, tahun 2016 Tanjung Jabung barat sebanyak 37.240 jiwa sementara Kota

Jambi masih pada posisi tertinggi sebanyak 51.610, pada tahun 2015 Kabupaten Tanjung Jabung Barat menempati angka 39.100 jiwa dan Kota Jambi masih berada pada posisi tertinggi sebanyak 55.500 jiwa. Kesimpulannya dalam lima tahun terakhir Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan angka tertinggi kedua Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan miskin berdasarkan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu

Dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS- I), keluarga sejahtera II (KS- II), keluarga sejahtera III (KS- III), dan keluarga sejahtera III plus (KS- III Plus). Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan 21 indikator sesuai dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor- faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Faktor- faktor dominan tersebut terdiri dari (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) pemenuhan kebutuhan psikologi; (3) kebutuhan pengembangan; dan (4) kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya.⁹

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara lebih terperinci kemiskinan terjadi oleh karena beberapa sebab:¹⁰

- A. Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari penduduk miskin.
- B. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.

⁹ https://www.bappenas.go.id/files/3513/4986/1937/laporan-akhir-evaluasi-28-jan-1__20110512124617__1.pdf . Diakses pada 1 Juli 2020 pukul 03.47 WIB

¹⁰ http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Dimensi_Kemiskinan20130130135844.pdf . Diakses pada 1 Juli 2020 pukul 03.27 WIB.

- C. Penyebab sub-budaya yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
- D. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang pemerintah dan ekonomi.
- E. Penyebab structural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan dari struktur sosial.

Pertumbuhan ekonomi menekankan pada beberapa hal seperti: (1) peningkatan produktivitas barang dan jasa; (2) investasi; (3) perluasan peluang dan daya serap tenaga kerja; (4) pengurangan angka pengangguran; (5) penciptaan dan penyebarluasan inovasi; dan (6) dukungan IPTEK; serta (7) peningkatan daya saing. Ketujuh hal tersebut mensyaratkan pengembangan sumber daya manusia yang berkeahlian melalui pendidikan.¹¹

Keberadaan sebuah perusahaan bisnis berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Pemerataan ekonomi hendaknya melibatkan seluruh elemen masyarakat yang berkaitan. Situasi sosial yang minim kesenjangan akan menciptakan tatanan masyarakat yang aman dan tenteram. Peralnya, permasalahan-permasalahan sosial dan tindak kejahatan dilatarbelakangi situasi kemiskinan seseorang. Dibutuhkan pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hal ini memiliki peluang dalam mengurangi angka kemiskinan, didukung oleh keberadaan bisnis perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam.

¹¹ Alim Harun, Vevi Sunarti & Wendi Ahmad Wahyudi. 2018, "Pkbm dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sesuai Target Sdg's" ,Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, vol, 1 No. 2, hlm 303.

Tabel 1.3
Data Kegiatan Pertambangan Umum (Gal C) Tahun 2013 di Tanjung
Jabung Barat

No.	Nama Perusahaan	Bahan Galian	Luas Produksi (Ha)	Lokasi
1.	PT. PetroChina Ltd	Minyak Bumi	-	Betara
2.	PT. Ranhill	Minyak Bumi		Betara
3.	CV. Chandra Jaya	Batu Andesit	2	Suban
4.	Epeng Suryadi	Batu Andesit	10	Dsn. Kebun
5.	Ismed	Laterite	1	Dsn. Kebun
6.	Suprapti	Laterite	1	Dsn. Kebun
7.	Kemas Firman	Batu Splite	2,3	Lubuk Lawas
8.	CV. Kemas Bertuah	Laterite	1,7	Lubuk Bernai
9.	Rudi Haryanto	Laterite	1,6	Lubuk Bernai
10.	Iswandi	Laterite	25	Lubuk Lawas
11.	Edy Zulkarnain	Tanah Urug	2,5	Lubuk Lawas
12.	Nurdin, SE	Laterite	2	Lubuk Lawas
13.	Rosdiyanto	Urug Splite	2	Lubuk Lawas
14.	Luyanto	Urug Splite	3,9	Lubuk Lawas
15.	Hariyadi	Urug Splite	1	Lubuk Lawas
16.	Rudi Haryanto	Tanah Urug	2	T. Raja
17.	Arusman Limbong	Laterite	1,9	Lubuk Terap
18.	Nasirwan	Tanah Urug	1	Penyabungan
19.	Rasn Siarsih	Laterite	10	Lubuk Terap
20.	Hendri	Tanah Urug	1,5	Lubuk Trentang
21.	Fakhruddin	Tanah Urug	2,7	Betara
22.	Turman	Tanah Urug	2,7	Betara
23.	Erliana	Tanah Urug	20	Betara

24.	Hui Janto	Tanah Urug	1,4	Betara
25.	Zainal S,pt	Tanah Urug	1,3	Betara
26.	Edy Zulkarnain	Tanah Urug	3,2	Betara
27.	Umar Ermulan	Tanah Urug	2	Betara
28.	Ahmad Gantek	Tanah Urug	1,8	Betara
29.	PT. Bukit Kausar	Sirtu	2	Renah Mendaluh
30.	PT. Alam Nusa Adijaya	Tanah Urug	20	Tebing Tinggi
31.	Alam Nusa Adijaya	Tanah Urug	20	Teluk Pengkah

Sumber: Tanjabbarkab.go.id/site/e-s-d-m/

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, salurkan RP. 32,68 Milliar dana CSR. Realisasi dana CSR ini meliputi infrastruktur, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, sosial budaya, kesehatan dan lingkungan. Kabupaten Tanjung Barat sebagai tempat operasi perusahaan-perusahaan CSR diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2015. Perusahaan diwajibkan memenuhi tanggung jawab sosialnya secara optimal dan berkesinambungan sesuai amanat Peraturan Daerah tersebut.

Dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 1 Tahun 2015 Pasal 7, Penyelenggaraan Program TJSLP Perusahaan wajib:

- a. menetapkan komitmen terhadap TJSLP di dalam peraturan perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan;
- b. menyusun rancangan dan melaksanakan TJSLP dengan memperhatikan perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
- c. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain;
- d. menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan usulan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Program TJSLP kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Bapedda Tanjabbar tahun ini realisasi program TJSLP dari 17 perusahaan yang melaksanakan program adalah sebanyak Rp 32.686.362.288. Program TJSLP untuk pembangunan Infrastruktur sebanyak 71 kegiatan dengan total dana Rp 23.079.603.984. Untuk kegiatan yang untuk mendukung kegiatan di bidang pendidikan ada 67 kegiatan dan mengeluarkan dana Rp 3.530.792.933. Di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang paling banyak dilakukan perusahaan, ada 312 kegiatan dengan total dana Rp. 3.065.553.478. Program kegiatan lain yang di bidang sosial budaya ada 407 kegiatan dengan dana Rp 1.548.611.085. Bidang Lingkungan ada 33 kegiatan dengan nilaisebesar 1.097.668.399. Sementara itu Bidang kesehatan melaksanakan 30 kegiatan dengan total Rp. 347,182,409,-.¹²

PT. Wirakarya Sakti (PT. WKS) sebagai perusahaan terbesar yang mengelola hutan tanaman di Provinsi Jambi menerapkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitar perusahaan atau dikenal dengan istilah CSR yang merupakan salah satu *social license* dengan harapan dapat mewujudkan keharmonisan hubungan yang terjalin dengan masyarakat di sekitar perusahaan. Dalam rangka menghadapi persaingan global, komitmen terhadap kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi lingkungan dan fungsi sosial

¹²<https://jambi.tribunnews.com/2019/01/10/forum-tjslp-tanjabbar-salurkan-dana-rp-3268-miliar-bantu-infrastruktur-hingga-lingkungan?page=2>. Diakses 1 Juli 2020 pada pukul 05.52 WIB

menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menuju Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) atau *Sustainable Forest Management* (SFM).¹³

Visi, Misi dan Kebijakan Perusahaan visi PT WKS adalah "Menjadi perusahaan kehutanan kelas dunia, yang mempraktekkan pengelolaan hutan secara lestari, dengan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak secara ekonomi dan ramah lingkungan". Sedangkan Misi PT WKS adalah mengelola dan mengembangkan sumberdaya hutan secara profesional guna meningkatkan manfaat bagi pemangku kepentingan dengan cara; Mengembangkan hutan tanaman industri yang lestari dan berkualitas tinggi sebagai sumber bahan baku pulp dengan harga terbaik dan rendah resiko. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat dan industri terkait yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Melindungi areal hutan yang mempunyai nilai konservasi dan meningkatkan kelestarian lingkungan hutan. Menghasilkan keuntungan yang memadai untuk ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak oleh negara.¹⁴

Sebagai Perusahaan terbesar yang mengelola Hutan Tanaman Industri di Provinsi Jambi, sebagai amanat undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas PT WKS diwajibkan untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya melalui program CSR terutama bagi masyarakat disekitar lokasi operasional perusahaan. Secara garis besar kegiatan CD yang dijalankan oleh pihak PT WKS dapat dibedakan dalam 3 kelompok yang meliputi: kegiatan

¹³ Dzul Afifah Arifin, "*Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Oleh PT. Wirakarya Sakti Dalam Penguatan Ekonomi Lokal*", Skripsi, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, 2011.

¹⁴<https://www.google.com/search?q=pt+wks&oq=pt+wks&aqs=chrome..69i57.2563j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8-Ringkasan-Publik-PT.WiraKaryaSakti-2017>

sosial, proyek fisik dan kegiatan ekonomi (Laporan Tahunan PT WKS). Secara rinci berbagai kegiatan CD pada PT WKS ini berdasarkan 3 kelompok diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini.¹⁵

Tabel 1.4
Bentuk Program Community Development (CD) dalam CSR pada PT.
WKS

No.	Program	Bidang Kegiatan
1.	Program Ekonomi	Kewirausahaan Koperasi Tambak Peternakan Pembibitan
2.	Program Fisik	Sekolah Tempat Ibadah Jalan Pasar
3.	Program Sosial	Pendidikan Kesehatan Pemuda Lingkungan Hidup Keagamaan

Sumber: <https://www.google.com/search?q=pt+wks&oq=pt+wks&aqs=chrome..69i57.2563j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8-Ringkasan-Publik-PT.WiraKaryaSakti-2017>

¹⁵Erfit. 2017. “ Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Pembiayaan Pembangunan Pertanian di Provinsi Jambi ”. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Vol. 4 No. 3. ISSN: 2338-4603. hlm 151-152.

Terbukti dari beberapa penelitian terdahulu, implementasi *Corporate Social Responsibility* dianggap berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan. *Pertama*, pada penelitian Jamaluddin dan Suhardi M. Anwar pada tahun 2017 yang berjudul “ Pengaruh CSR PT. Vale Indonesia Tbk Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kecamatan Nuha “¹⁶. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif, mendeskripsikan dan menggambarkan bagaimana implementasi program CSR pada PT. Vale Indonesia Tbk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kecamatan. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa program *Corporate Social Responsibility* berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

Beberapa indikator keberhasilan CSR PT. Vale Indonesia Tbk ditinjau dari sektor tingkat pendidikan masyarakat sekitar dan meningkatnya pendapatan kelompok tani sekitar perusahaan. Realisasi program *Corporate Social Responsibility* disektor pendidikan yakni; perbaikan gedung sekolah, pengadaan bus sekolah, perpustakaan, beasiswa, insentif bagi guru honorer di Soroako bantuan fasilitas Komputer, serta pemberdayaan keterampilan siswa (menjahit, melukis dll.). CSR di sektor pertanian meliputi; bantuan pupuk, Pelatihan Budidaya Organik, Fasilitas Lokakarya Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSLRB) dan bantuan dana operasional Petani. Tanggung Jawab sosial perusahaan tersebut memberikan dampak baik terhadap kesejahteraan

¹⁶ Jamaluddin, Suhardi M. Anwar. 2017. “Pengaruh CSR PT. Vale Indonesia Tbk Terhadap Kesejahteraan Sekitar Kecamatan Nuha”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo, Volume 3 No. 2, Hlm 137-144.

masyarakat sekitar Kecamatan Nuha sebagai daerah operasional PT. Vale Indonesia Tbk.

Kedua, senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Bobby Jayadi, Danang Manusomo, dan Trismiaty pada tahun 2018. Penelitian yang berjudul “*Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di PT. SOCFIN*”¹⁷. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi CSR dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di PT. Socfin Indonesia Bangun Bandar/Tanjung Maria Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Penelitian yang menggunakan metode deskriptif ini, memberikan kesimpulan analisa bahwa secara implementatif CSR PT. Socfin Indonesia memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian menyatakan bahwa program yang sudah terlaksana diantaranya dibidang keagamaan, kesehatan, pendidikan ,olahraga, Insfratruktur dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan implementasi program yang ada masyarakat menilai porgram CSR PT. Socfin Indonesia 71,89 % sudah baik. Pihak perusahaan tidak melakukan perencanaan dalam program CSR, sehingga masyarakat berperan dengan cara mengajukan proposal bantuan yang akan diproses dan dikabulkan oleh perusahaan baik berbentuk bahan fisik maupun berbentuk dana. Sehingga dalam hal ini, masyarakat mau tidak mau aktif dalam program tersebut.

¹⁷ Bobby Jayadi Pratama, Danang Manumono, Trismiaty. 2018. “ *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di PT. SOCFIN*”,Fakultas Pertanian INSTIPER, Jurnal MASEPI, Volume 3 No. 1, hlm 3.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dan berbagai referensi konsep ideal terkait realisasi Program *Corporate Social Responsibility* terdapat kesamaan, yakni sama-sama membahas tentang keberhasilan implementasi CSR berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan. Hanya saja terdapat perbedaan studi kasus penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini. Yang mana dalam penelitian ini akan mengangkat studi kasus pada *Corporate Social Responsibility* PT. Wirakarya Sakti, sebagai perusahaan Hutan Tanaman Industri terbesar di Provinsi Jambi. Anak perusahaan *Asian Pulp & Paper* korporasi Sinarmas ini berkantor pusat di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Memiliki 10 Unit Kerja tersebar diberbagai wilayah Provinsi Jambi.

Unit kerja yang terdekat berbatasan langsung dengan Kantor Pusat Operasional PT. Wirakarya Sakti adalah Distrik VI, yang akan menjadi objek penelitian skripsi ini. Ditarik Visi Misi PT. Wirakarya Sakti memiliki tanggung jawab sosial terhadap pengelolaan hutan lestari dan hubungan harmonis terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan pemaparan data awal diatas, terdapat fenomena bahwa kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan pusatnya perusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Wirakarya Sakti. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Tanjung Jabung Barat adalah Kabupaten nomor dua tertinggi angka jumlah penduduk miskin dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Oleh karenanya muncul ketertarikan untuk meneliti sumbangsi *Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung

Barat melalui studi kasus PT. Wirakarya Sakti sebagai perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) terbesar di Provinsi Jambi. Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis layak dan tertarik mengangkat sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Wirakarya Sakti Unit Kerja Distrik VI Tanjung Jabung Barat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sekitar”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menyusun proposal Skripsi yang berjudul: Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sekitar (Studi Kasus PT. Wirakarya Sakti Unit Kerja Distrik VI Tanjung Jabung Barat Jambi), rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Wirakarya Sakti Unit Kerja Distrik VI di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Bagaimana dampak dari *Corporate Social Responnsibility* (CSR) PT. Wirakarya Sakti Unit Kerja Distrik VI terhadap kesejahteraan masyarakat desa sekitar?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi CSR PT. Wirakarya Sakti Unit Kerja Distrik VI di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Untuk menggambarkan bagaimana dampak dari CSR PT. Wirakarya Sakti Unit Kerja Distrik VI terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sekitar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis, akademisi, dan peneliti lainnya. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yakni:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pemahaman atas ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama di bangku perkuliahan. Melalui penelitian ini dapat menambah khazanah teoritis dan konsep ideal sebuah *Corporate Social Responsibility* khususnya di Provinsi Jambi yang dapat dikembangkan kembali secara keilmuan (akademik).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga nantinya dapat memberikan manfaat bagi Praktisi, NGO dan Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berkelanjutan. Selain meneliti

dampak CSR di tengah masyarakat, harapannya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan CSR secara praktik guna menciptakan hubungan mutual antara perusahaan, masyarakat dan seluruh *stakeholder* terkait.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan Definisi tersebut menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.¹⁸

Untuk mengevaluasi pelaksanaan CSR, John Elkington pada tahun 1994 memperkenalkan istilah *Triple bottom line* yang menunjukkan tiga garis bawah

¹⁸ Reny Dyah Retno M. 2012. “*Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010)*”. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Volume 1, No.

yakni “orang, planet dan keuntungan”. *Triple bottom line* merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi CSR. “Orang” disini mengacu pada praktik perburuhan yang adil, masyarakat dan wilayah tempat bisnis beroperasi. “Planet” mengacu pada praktik lingkungan yang berkelanjutan, sedangkan “keuntungan” adalah nilai ekonomi yang diciptakan oleh organisasi setelah dikurangi biaya semua input, termasuk biaya modal. Langkah ini diklaim membantu beberapa perusahaan untuk lebih sadar akan tanggung jawab sosial dan moral mereka. Wacana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) kini menjadi isu sentral yang semakin populer dan bahkan ditempatkan pada posisi penting, karena itu kian banyak pula kalangan dunia usaha dan pihak-pihak terkait mulai merespon wacana ini, tidak sekedar mengikuti tren tanpa memahami esensi dan manfaatnya.¹⁹

Menurut Zadek dalam Prajarto dan kawan-kawan pada tahun 2010 menjelaskan ada tiga generasi dalam perkembangan CSR, yang *pertama* adalah CSR sering kali dikaitkan dengan *corporate philanthropy* yang diarahkan untuk mendongkrak capaian reputasi. *Kedua*, ditandai oleh pemikiran bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis jangka panjang, dan yang *ketiga* member tekanan pada upaya korporasi untuk menghilangkan kemiskinan dan mencegah terjadinya degradasi lingkungan serta upaya membangun bisnis bersama masyarakat.

¹⁹ Alexander G. Flor dan Hafied Cangara, *Komunikasi Lingkungan*. Penanganan Kasus-kasus Lingkungan Melalui Strategi Komunikasi. (Jakarta: Prenamedia Group, 2018) hlm 235

Tanggung jawab sosial perusahaan mencakup enam indikator inisiatif sosial perusahaan sebagai berikut²⁰:

1. Kemanusiaan, yakni sumbangan perusahaan untuk amal, termasuk uang tunai, barang dan jasa.
2. Relawan komunitas, merupakan kegiatan relawan yang diselenggarakan oleh perusahaan.
3. Praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial: produk yang diproduksi secara etis yang menarik bagi segmen pelanggan.
4. Promosi, kampanye advokasi yang didanai oleh perusahaan.
5. Hasil pemasaran, yakni sumbangan amal berdasarkan penjualan produk.
6. Pemasaran sosial perusahaan, kampanye perubahan perilaku yang didanai perusahaan.

Tindakan umum *Corporate Social Responsibility* (CSR) mencakup²¹:

1. Kelestarian lingkungan
Kegiatan seputar daur ulang, pengelolaan limbah, pengelolaan air, energy terbarukan, bahan yang dapat digunakan kembali, rantai pasokan “hijau”, mengurangi penggunaan kertas dan mengadopsi standar bangunan *Leadership in Energy and Environmental Design* (LEED).
2. Keterlibatan Masyarakat
Hal ini termasuk mengumpulkan uang untuk badan amal setempat, menyediakan sukarelawan, mensponsori acara lokal, mempekerjakan pekerja

²⁰*Ibid*, hlm. 233.

²¹*Ibid*, hlm. 234.

lokal, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, terlibat dalam praktik perdagangan yang adil dan sebagainya.

3. Pemasaran Etis

Perusahaan yang secara etis memasarkan ke konsumen menempatkan nilai lebih tinggi pada pelanggan mereka dan menghormatinya sebagai orang-orang yang berakhir dengan dirinya sendiri. Mereka tidak mencoba memanipulasi atau secara salah mengiklankan ke konsumen potensial. Hal ini penting bagi perusahaan yang ingin dipandang etis.

Selain itu, *International Organization for Standardization* (ISO) 26000 mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh²².

ISO adalah internasional untuk standardisasi (*International Organization for Standardization*) dan disingkat ISO. ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standardisasi nasional setiap

²² Dyah Ayu Setya Ningrum. "Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada PT. Apac Inti Corpora, Bawen). Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, 2011. Diakses pada 18 Juni 2020 pukul 04.00 WIB

negara. Lembaga ISO didirikan pada 23 Februari 1947, menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia.²³

Dalam ISO 26000 tersebut terdapat tujuh (7) subjek dasar dan tujuh (7) prinsip. Tujuh subjek dasar terdiri dari²⁴:

1. Tatakelola Organisasi;
2. Hak Azasi Manusia;
3. Praktik Perburuhan;
4. Lingkungan;
5. Praktik Operasi yang Adil;
6. Isu Konsumen; dan
7. Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat.

Untuk mengukur CSR yang berhasil adalah CSR yang²⁵:

- 1.1 Mampu meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari produk, jasa, proses produksi dan operasi bisnis serta keputusan perusahaan.
- 1.2 Memiliki dampak yang lebih besar dan lebih luas terhadap pembangunan berkelanjutan (aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup).
- 1.3 Sesuai karakteristik organisasi, pemangku kepentingan dan masyarakat setempat serta kearifan lokal.
- 1.4 Terintegrasi dalam kebijakan, budaya, strategi dan operasi perusahaan.

²³<https://www.safetyshoe.com/tag/pengertian-standar-iso/>. Diakses pada 20 Juni 2020 pukul 10.24 WIB

²⁴ Suryani S. Manik dkk. “*Peddoman KADIN Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*” (Jakarta: Kamar Dagang dan Industri Indonesia, 2015) hlm. 4

²⁵*Ibid*, hlm. 19

- 1.5 Memenuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.6 Melibatkan pemangku kepentingan yang terkena dampak pada setiap tahapannya.
- 1.7 Mampu mendorong organisasi lain dalam lingkaran pengaruhnya (*sphere of influence*) untuk juga berperilaku bertanggung jawab sosial.

1.5.2 Teori Kesejahteraan

Menurut Goodin (1999) negara kesejahteraan sering diasosiasikan dengan proses distribusi sumber daya yang ada kepada publik, baik secara tunai maupun dalam bentuk tertentu (*cash benefits or benefits in kind*). Konsep kesejahteraan juga terkait erat dengan kebijakan sosial-ekonomi yang berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara umum. Beberapa bidang yang paling mendesak untuk diperhatikan dalam kebijakan kesejahteraan adalah masalah pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan kerja..²⁶

Tidak jauh berbeda, konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) berkaitan dari perkembangan demokrasi, terdapat pemenuhan berbagai platform sebagai upaya pemenuhan negara kesejahteraan. Menurut Hobsbawm (2008) implementasi terhadap gagasan tersebut merupakan cerminan dari proses perkembangan demokrasi dan kapitalisme terutama di Eropa, dimana kehadirannya tidak dapat dilepaskan dari proses negosiasi politik antara artikulasi perjuangan politik kalangan kiri dan kelas pekerja dengan perkembangan formal social kapitalisme. Benturan-benturan antara kelas pekerja dan modal berhasil didamaikan dengan terbangunnya common platform penataan Negara berbasis *welfare state*.

²⁶ Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Jurnal Sospol, Malang, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UMM, Vol. 2 No. 1, Tahun 2016, hlm 110.

Platform tersebut terwujud dalam berbagai program-program seperti pemenuhan berbagai kebutuhan mendasar manusia (*basic human needs*) oleh Negara pada bidang pendidikan, perawatan kesehatan, penyediaan perumahan yang layak, perawatan untuk anak-anak, pemenuhan kebutuhan ekonomi bagi mereka yang lanjut usia, pengangguran maupun mereka yang memiliki kekurangan fisik. Beberapa program-program Negara kesejahteraan telah diakomodasi oleh perkembangan Negara di Eropa sejak abad ke-19.²⁷

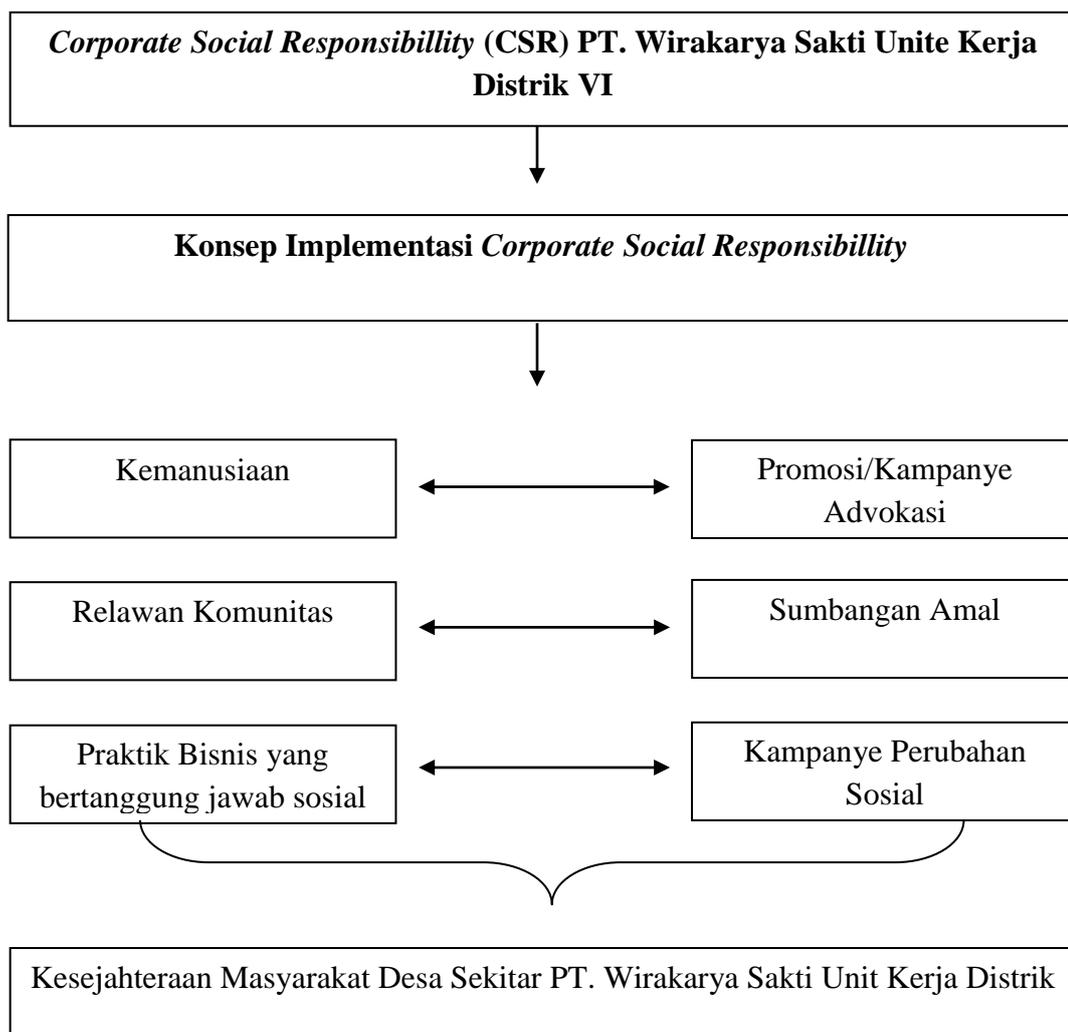
Menurut Goodin (1999), terdapat enam alasan yang menjadi tujuan sekaligus juga menjadi alat ukur kesuksesan dalam menjalankan negara kesejahteraan (*welfare state*), yaitu²⁸:

1. Untuk mempromosikan efisiensi ekonomi (*promoting economic efficiency*)
2. Untuk mengurangi kemiskinan (*reducing equality*)
3. Mempromosikan kesamaan sosial (*promoting social equality*)
4. Mempromosikan integrasi sosial atau menghindari eksklusi sosial (*promoting social integration and avoiding social exclusion*)
5. Mempromosikan stabilitas sosial (*promoting social stability*)
6. Mempromosikan otonomi atau kemandirian individu (*promoting autonomy*).

²⁷*Ibid.*, hlm 113.

²⁸*Ibid.*, hlm 111

1.6 Kerangka Pikir



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Cresswell mendefinisikan metode penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti, mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke umum. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh lexy mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.²⁹

Menurut Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara *holistic*, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁰ Pendekatan kualitatif sengaja dipilih penulis menganalisis sebuah fenomena antara konsep, kebijakan dan hasil yang ditemukan dilapangan saat dilakukannya penelitian. Selain terjun langsung kelapangan, penulis juga mengumpulkan data-

²⁹ John W. Creswell. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013). hal. 4-5

³⁰ Ismail Nurdin & Sri Hartati. "*Metodologi Penelitian Sosial*". (Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2019). hal. 75

data yang berasal dari literature, dokumentasi, atau wawancara kepada sumber yang berkaitan.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Tepatnya di PT. Wirakarya Sakti Unit Kerja Distrik VI, Desa Kelagian, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian perlu adanya fokus penelitian. Dimana fokus penelitian tersebut bertujuan untuk memfokuskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Untuk mempertajam dalam penelitian kualitatif, Spradley dan Sugiono menyatakan bahwa “fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait situasi sosial. Penentuan fokus didasarkan pada kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial³¹. Oleh karenanya peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sekitar (Studi Kasus PT. Wirakarya Sakti Unit Kerja Distrik VI Tanjung Jabung Barat Jambi).

1.7.4 Sumber Data

Sumber data mengemukakan tentang sumber data yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan

³¹ Sugiyono. “*Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif*” (Bandung: Aifabeta, 2017). hlm. 209.

informasi dari pihak-pihak yang terkait dalam pengumpulan data. Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu³²:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer ini diperoleh penulis dari wawancara dengan informan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui wawancara dan pengamatan gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Guna analisis objek penelitian dilapangan, penulis mewawancarai pihak yang mengetahui secara langsung yakni; *Head District VI PT. Wirakarya Sakti*, Kepala Seksi *Corporate Social Responsibility PT. Wirakarya Sakti* Unit Kerja Distrik VI, Kepala Desa dan Masyarakat Desa sekitar wilayah kerja PT. Wirakarya Sakti Unit Kerja Distrik VI.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dokumentasi. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa buku, arsip, dan dokumen resmi.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan adalah metode yang dipakai oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapakah yang akan dijadikan sumber data (informan). Oleh karena penelitian kualitatif tidak mengenal sampel (cuplikan),

³²*Ibid.*, hlm. 104

maka penentuan informan dilakukan berdasarkan keterlibatan (keterkaitan) seseorang (informan) dengan objek penelitian yang akan diteliti³³. Teknik sampling yang digunakan ialah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tersebut berdasarkan pada sampel yang dipilih adalah mereka yang memiliki informasi yang lebih luas atau kaya (*rich information*). Untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sekitar (Studi Kasus PT. Wirakarya Sakti Unit Kerja Distrik VI Tanjung Jabung Barat Jambi). Beberapa informan dalam penelitian ini yakni:

1. *Head District VI* PT. Wirakarya Sakti
2. Kepala Seksi *Corporate Social Responsibility* PT. Wirakarya Sakti Unit Kerja Distrik VI
3. Kepala Desa berdekatan langsung dengan Kantor PT. Wirakarya Sakti Unit Kerja Distrik VI yakni; Desa Kelagian, Desa Sungsang, Desa Teluk Nilau, Desa Sungai Rambai dan Desa Karya Maju
4. Tokoh Masyarakat

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain

³³ Pahrudin, dkk. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi* 2017. hlm. 24.

atau lewat dokumen³⁴. Penelitian menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data diantaranya :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh Karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan³⁵. Proses wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan informan penelitian mengenai waktu untuk dapat melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan mendalam kepada informan.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tertulis yang berhubungan dengan penelitian³⁶.

3. Observasi

³⁴ Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", Bandung, Alfabeta, Cv, oktober 2017. hlm. 230

³⁵ *Ibid.*, hlm. 231

³⁶ *Ibid.*, hlm. 240

Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi³⁷.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain³⁸. Adapun prosedur analisis tersebut adalah sebagai berikut³⁹:

a) Reduksi Data

Data dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi data juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan dalam hal ini yang dapat dilakukan adalah pengkodean, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data.

b) Penyajian Data

Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dengan melihat penyajian-penyajian peneliti dan dapat memahami apa

³⁷*Ibid.*, hlm. 226.

³⁸*Ibid.*, hlm. 244.

³⁹*Ibid.* hlm. 247.

yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Kecenderungan kognitifnya akan menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang disederhanakan dan diseleksi atau konfigurasi yang mudah dipahami, polanya berupa matrik, jaringan dan bagan.

c) Menarik kesimpulan atau verifikasi

Makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni yang merupakan validasinya.

1.7.8 Keabsahan Data/Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan menggunakan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data⁴⁰.

Dalam metode yang digunakan untuk menguatkan kebenaran penelitian ini, maka penulis menggunakan triangulasi data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme triangulasi, yaitu kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori dan teknik dalam suatu penelitian atau gejala social. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 241.

keunggulan dan kelemahan sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid⁴¹.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah peneliti dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mengelompokkan atau membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I** : Bab yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, kerangka pikir, metode penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Bab yang berisikan deskripsi *Corporate Social Responsibility* PT. Wirakarya Sakti Unit Kerja Distrik VI di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- BAB III** : Bab yang berisikan tentang jawaban dari Penelitian dan Pembahasan rumusan masalah yang didapat dari hasil penelitian.
- BAB IV** : Bab yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang didasarkan pada bab-bab sebelumnya.

⁴¹ Buku Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi, Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, 2017, hlm, 59